

**TIM PENGGERAK PKK DESA BUKIT JAYA  
KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI  
SULAWESI TENGAH**  
Alamat : Jalan Belimbing Desa Bukit Jaya

**SURAT KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK DESA BUKIT JAYA**  
Nomor : 420 /21 / TP-PKK /2008  
**TENTANG**  
**PENDRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK**

Tim Penggerak PKK Desa Bukit Jaya

Menimbang : Bawa dalam ikut serta mencerdaskan bangsa dan bernegara, maka sangatlah penting jika pendidikan dimulai sejak usia dini atau usia pra Sekolah Dasar.

Mengingat : Surat keputusan Kepala Desa Bukit Jaya Nomor 420 /20/PEM/ 2008 Tentang pengangkatan pendiri TK Handayani.

Memperhatikan 1. Adanya desakan masyarakat yang menginginkan agar di Desa Bukit Jaya berdiri sebuah lembaga pendidikan Taman kanak-kanak.  
2. Bawa sejak berdirinya Desa Bukit Jaya hingga sekarang belum ada Sekolah Taman Kanak-Kanak

**MEMUTUSKAN**

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak dengan nama Handayani   |
| Pertama    | : | Bawa lokasi berdirinya TK Handayani berada diloksi Desa Bukit Jaya.  |
| Kedua      | : | Segala biaya dalam pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak menjadi beban Tim Penggerak PKK dan masyarakat Desa Bukit Jaya. |
| Ketiga     | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  |
| Keempat    | : | Bawa Pembukaan Sekolah Taman Kanak-Kanak Handayani sejak Tanggal 17 Juli 2008.   |
| Kelima     | : |  |

Ditetapkan di : Bukit Jaya  
Pada tanggal ; 9 Agustus 2008

**TIM PENGGERAK PKK DESA BUKIT JAYA**

*Ketua*

*SUFATIMAH*

*Sekretaris*

*Ani Sanjaya*

ANI SANJAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI  
SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 503/217/DPMPTSP/SPD/III/2023

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Dasar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

**Memperhatikan :** Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor : 748/421.1/DIKBUD Tanggal 27 Februari 2023

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR SD NEGERI 1 TOLISU DI DESA TOLISU KECAMATAN TOILI
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Dasar Kepada :
1. Nama Lembaga : SD NEGERI 1 TOLISU
  2. Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
  3. Alamat : Jl. Cendrawasih No. 2 Desa Tolisu Kecamatan Toili
  4. Penanggungjawab : KEPALA SEKOLAH
  5. Yayasan/Penyelenggara: Pemerintah Kabupaten Banggai
- KEDUA** : Pemegang Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mintaati Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **03 Maret 2026** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 03 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANGGAI



Drs. YUNUS LEMBA KURAPA

NIP. 19670103 199303 1 011